



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sektor Usaha Informal

Menurut Mulyadi (2008:95) sektor informal diartikan sebagai unit-unit usaha yang tidak atau sedikit sekali menerima proteksi ekonomi secara resmi dari pemerintah. Sedangkan unit-unit usaha yang mendapatkan proteksi ekonomi secara resmi dari pemerintah disebut sebagai sektor formal. Proteksi ekonomi itu antara lain berupa tarif proteksi, kredit dengan bunga yang relatif rendah, pembimbingan, penyuluhan, perlindungan dan perawatan tenaga kerja, terjaminnya arus teknologi impor, hak paten dan sebagainya.

Dalam menggarap dan membangun ekonomi informal, pemerintah dan birokrasi masih mengalami kesulitan dan kendala, diantaranya sebagai berikut (Mulyadi, 2008:89) :

1. Kurangnya pengetahuan deskriptif namun analitis mengenai jenis, unit dan luas kegiatan ekonomi informal ini.

2. Tidak mempunyai kekuasaan birokrat untuk mencapai daerah pedesaan, pinggiran kota, dan pemukiman kumuh yang kebanyakan digeluti oleh pelaku informal.
3. Kurangnya tenaga yang mampu mengetahui dengan baik seluk beluk ekonomi informal.
4. Tidak adanya sumber dana yang dapat mencukupi permintaan sektor tradisional yang luas ini.

Selanjutnya Mulyadi (2008:95) menjelaskan ciri-ciri sektor informal sebagai berikut:

6

1. Kegiatan usaha tidak terorganisasikan secara baik, karena timbulnya unit usaha tidak mempergunakan fasilitas/ kelembagaan yang tersedia di sektor formal.
2. Pada umumnya unit usaha tidak mempunyai izin usaha.
3. Pola kegiatan usaha tidak teratur, baik dalam arti lokasi maupun jam kerja.
4. Pada umumnya kebijaksanaan pemerintah untuk membantu golongan ekonomi lemah tidak sampai ke sektor ini.
5. Unit usaha mudah keluar masuk dari satu subsektor ke lain subsektor.
6. Teknologi yang dipergunakan bersifat primitif.
7. Modal dan putaran usaha relatif kecil, sehingga skala operasi juga relatif kecil.
8. Pada umumnya unit usaha termasuk golongan *one-man-enter prises* dan kalau mengerjakan buruh berasal dari keluarga.

9. Sumber dana modal usaha pada umumnya berasal dari tabungan sendiri atau dari lembaga keuangan yang tidak resmi.
10. Hasil produksi atau jasa terutama dikonsumsi oleh golongan masyarakat kota/ desa yang berpenghasilan menengah.

Menurut Simanjuntak dalam Bagus (2013), kegiatan sektor informal sangat beragam yaitu : pedagang kaki lima (PKL), pedagang keliling, tukang warung, tukang cukur, tukang becak, tukang sepatu, tukang loak. Sedangkan oleh BPS (dalam Bagus, 2013) kegiatan sektor informal dikelompokkan ke lima sub sektor ekonomi yaitu perdagangan (menetap dan keliling), jasa (tukang cukur, tukang reparasi, dll), bangunan (buruh, tukang batu, kuli bangunan, mandor, dll), angkutan (sopir, tukang becak, dll), industri pengolahan (termasuk industri rumah tangga dan kerajinan rakyat).

B. Pedagang Kaki Lima

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan salah satu contoh nyata dari aktivitas ekonomi sektor informal. Belum semua kabupaten di Indonesia yang sudah mempunyai peraturan daerah khusus untuk penataan dan pemberdayaan PKL. Keberadaan PKL ini cenderung dianggap mengganggu ketertiban umum dan estetika kota karena menggunakan lokasi berdagang di trotoar dan bahu jalan. Ruang publik yang diambil alih ini merupakan ruas pedestrian dan seringkali menimbulkan macet, tidak hanya karena penempatan warung di bahu jalan namun juga jumlah kendaraan para pembeli yang menyesaki area jalan.

Menurut Eridian dalam Sudaryanti (2000 : 8) “Pedagang kaki lima ialah orang-orang dengan modal relatif kecil/sedikit berusaha (produksi-penjualan

barang barang /jasa-jasa) untuk memenuhi kebutuhan kelompok konsumen tertentu dalam masyarakat”. Usaha itu dilakukan pada tempat-tempat yang dianggap strategis dalam suasana informal. Sedangkan definisi pedagang kaki lima menurut Pemerintah Republik Indonesia adalah seperti yang dikutip di bawah ini ,

“Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha per-dagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap” (Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 125 tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Kaki Lima).

Sementara itu, pengertian mengenai pedagang kaki lima menurut Pemerintah Kota Tegal juga selaras dengan definisi di atas, seperti yang dikutip di bawah ini,

“Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pedagang golongan ekonomi lemah dan penjual jasa yang dalam usahanya menggunakan sarana dan atau perlengkapan yang mudah dibongkar pasang, dipindahkan dan atau tidak permanen serta menempati fasilitas umum”. (Peraturan Daerah Kota Tegal nomor 3 tahun 2008 tentang Pengaturan Pedagang Kaki Lima).

Istilah pedagang kaki lima merupakan peninggalan zaman penjajahan Inggris. Diambil dari ukuran lebar trotoar yang waktu itu dihitung dalam *feet* sama dengan kaki, atau 1,5 meter (Deden, 2011). Pedagang yang berjualan ditrotoar tersebut kemudian disebut pedagang kaki lima (PKL). Jika melihat modal kaki lima adalah orang yang dengan modal relatif sedikit. Mereka berusaha dibidang produksi dan berjualan barang-barang (jasa-jasa) untuk memenuhi kelompok konsumen tertentu di dalam masyarakat. Aktifitasnya dilaksanakan pada tempat-tempat yang sangat strategis dalam suasana lingkungan yang informal.

C. Teori Sentralitas

Pengukuran sentralitas sesuatu jaringan telah diperkenalkan oleh Konig di tahun 1936. Oleh karena itu, pengukuran sentralitas dinyatakan dengan suatu angka yang disebut angka Konig (*Konig number*). Angka ini menunjukkan jumlah mata-rantai maksimum yang menghubungkan suatu titik dengan titik yang lain pada suatu sistem dengan jarak terpendek. Cara pengukuran yang digunakan menggunakan cara pengukuran jarak topologi yaitu dengan memperhatikan mata-rantai dan apabila suatu titik menunjukkan angka Konig rendah maka menunjukkan tempat pusat (*central place*) dari suatu sistem jaringan. Jaringan tersebut dapat sebagai jaringan lalu lintas dan titik dengan angka Konig rendah diumpamakan sebagai tempat pusat pada sistem jaringan lalu lintas tersebut. Dalam pengertian lalu lintas ini yang dimaksudkan dengan jarak adalah jarak yang sebenarnya dalam kilometer atau dapat pula dinyatakan dengan waktu dalam jam atau menit. Dengan metode ini setelah dapat dicari tempat pusatnya maka dapat dibuat perancangan mengenai pengembangan prasarana di pusat tempat tersebut (Bintarto, 1979:97).

D. Kondisi Sosial

Menurut Kamus Bahasa Indonesia kondisi diartikan sebagai suatu keadaan atau situasi. Sedangkan kondisi sosial masyarakat didefinisikan sebagai suatu keadaan atau situasi masyarakat yang ada pada negara tertentu dan pada saat tertentu (Kamus Umum Bahasa Indonesia, 2000). Jadi kondisi sosial adalah suatu keadaan yang berhubungan erat dengan keadaan atau situasi yang ada di dalam masyarakat tertentu yang terkait dengan keadaan sosial.

Menurut Dalyono dalam Basrowi dan Juariyah (2010), kondisi sosial adalah semua orang atau manusia lain yang mempengaruhi kita. Kondisi sosial yang mempengaruhi individu melalui dua cara yaitu langsung dan tidak langsung. Secara langsung yaitu seperti dalam pergaulan sehari-hari baik dari keluarga, teman dan pekerjaan. Secara tidak langsung melalui media masa baik cetak, audio maupun audio visual. Selanjutnya juga dijelaskan lingkungan sosial yang sangat berpengaruh pada proses dan hasil pendidikan adalah teman bergaul, lingkungan tetangga dan aktivitas dalam masyarakat.

Menurut Linton dalam Basrowi dan Juariyah (2010), kondisi sosial masyarakat mempunyai lima indikator yaitu:

1. Umur dan kelamin
2. Pekerjaan
3. Prestise
4. Famili atau kelompok rumah tangga
5. Keanggotaan dalam kelompok perserikatan.

E. Kondisi Ekonomi

Menurut Mulyanto Sumardi dan Hans Dieter Evers dalam Basrowi dan Juariyah (2010) keadaan ekonomi adalah suatu kedudukan yang secara rasional dan menetapkan seseorang pada posisi tertentu dalam masyarakat, pemberian posisi itu disertai pula dengan seperangkat hak dan kewajiban yang harus dimainkan oleh si pembawa status. Menurutnya pula ada ciri-ciri keadaan sosial ekonomi yaitu:

1. Lebih berpendidikan;

2. Mempunyai status sosial yang ditandai dengan tingkat kehidupan, kesehatan, prestise, pekerjaan, dan pengenalan diri terhadap lingkungan;
3. Mempunyai tingkat mobilitas ke atas lebih besar;
4. Mempunyai ladang luas;
5. Lebih berorientasi pada ekonomi komersial produk;
6. Mempunyai sikap yang lebih berkenaan dengan kredit; dan
7. Pekerjaan lebih spesifik.

Kecukupan pangan dan keperluan ekonomi bagi masyarakat baru terjangkau bila pendapatan rumah tangga cukup untuk menutupi keperluan rumah tangga dan pengembangan usaha-usahanya.

F. Kondisi Sosial Ekonomi

Salah satu status sosial dalam kehidupan masyarakat adalah status sosial ekonomi. Status sosial ekonomi dapat menggolongkan masyarakat ke dalam lapisan-lapisan ekonomi tertentu seperti status sosial ekonomi tinggi, status sosial ekonomi menengah dan status sosial ekonomi rendah (Mustolikh, 1999). Hanafi dalam Mustolikh (1999) mengemukakan bahwa status sosial ekonomi ditunjukkan oleh variabel-variabel seperti pendapatan, tingkat kehidupan, kekayaan, kedudukan dan jabatan, identifikasi terhadap kelas sosial tertentu.

Status sosial ekonomi merupakan kedudukan individu atau sekelompok dalam kehidupan masyarakat. Munculnya status sosial ekonomi tersebut disebabkan oleh perbedaan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dan tuntutan kehidupan.

Kondisi sosial ekonomi adalah suatu kedudukan yang diatur secara sosial dan menempatkan seseorang pada posisi tertentu dalam masyarakat, pemberian posisi itu disertai pula dengan seperangkat hak dan kewajiban yang harus dimainkan oleh sipembawa status (Sumardi dalam Basrowi dan Juariyah, 2010). Kondisi sosial ekonomi masyarakat ditandai adanya saling kenal mengenal antarsatu dengan yang lain, paguyuban, sifat kegotong-royongan dan kekeluargaan.

Mengenai kondisi sosial ekonomi, Soekanto yang dikutip dalam Basrowi dan Juariyah (2010) menjelaskan kondisi sosial ekonomi sebagai kaitan antara status sosial dan kebiasaan hidup sehari-hari yang telah membudaya bagi individu atau kelompok di mana kebiasaan hidup yang membudaya ini biasanya disebut dengan *culture activity*, kemudian ia juga menjelaskan pula bahwa dalam semua masyarakat di dunia baik yang sederhana maupun yang kompleks, pola interaksi atau pergaulan hidup antarindividu menunjuk pada perbedaan kedudukan dan derajat atau status kriteria dalam membedakan status pada masyarakat yang kecil biasanya sangat sederhana, karena di samping jumlah warganya yang relatif sedikit, juga orang-orang semua yang dianggap tinggi statusnya tidak begitu banyak jumlah maupun ragamnya.

G. Penelitian Yang Relevan

Penelitian relevan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Bagus Pramodhiatma Asihanto (2013) yang berjudul Implikasi Tempat Berjualan Terhadap Tingkat Pendapatan Sektor Informal. Metode kualitatif fenomenologis yang dipilih dan digunakan dalam

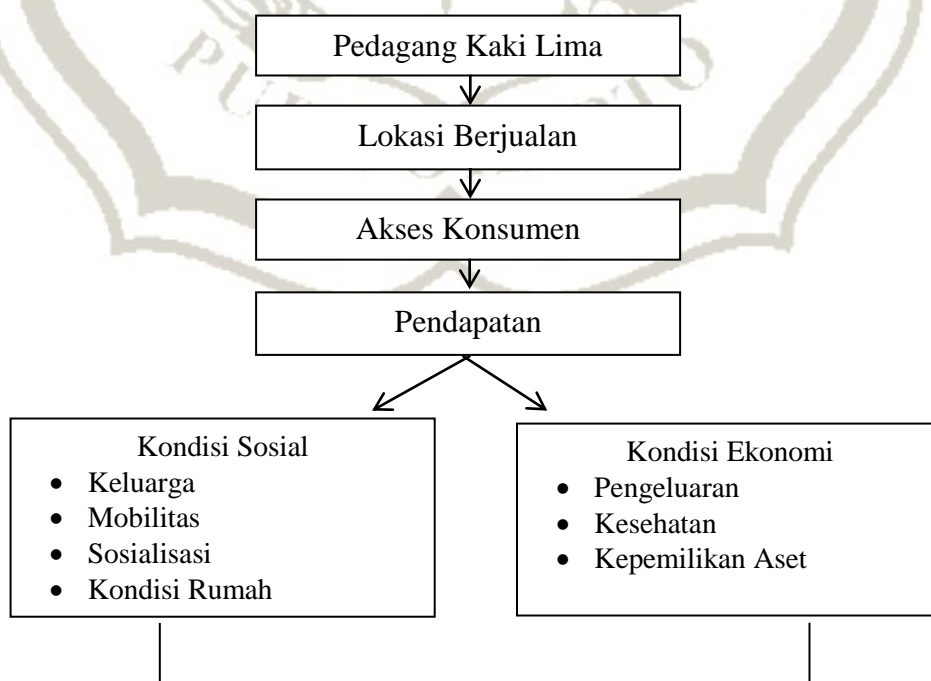
penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa posisi tempat berjualan para PKL binaan Dinas Pasar di PPS Merjosari tidak mempengaruhi tingkat pendapatan yang diperoleh PKL. Kebanyakan dari PKL Binaan Dinas Pasar yang berjualan aneka sayur dan bumbu membeli barang dagangannya dini hari dan sebagian besar PKL Binaan Dinas Pasar sebagian besar lebih merasanyaman berjualan di Pasar Dinoyo dibandingkan dengan berjualan di PPS Merjosari.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Meki Mustia Nofi (2014) yang berjudul Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat Sebelum dan Sesudah Pemindahan Pusat Pemerintahan di Kelurahan Air Pacah Kecamatan Koto Tengah Kota Padang. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan metode sampel *purposive sampling*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terjadi perubahan sosial ekonomi masyarakat sebelum dan sesudah pemindahan pusat pemerintahan, terjadi perubahan pendapatan, dan terjadi perubahan mata pencaharian penduduk.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Siska Anggraeni (2014) yang berjudul Peran Pembangunan Kawasan Wisata Jawa Timur Park II Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Sekitarnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pembangunan kawasan wisata Jawa Timur Park II terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat di sekitarnya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Hasil penelitiannya menunjukkan adanya peran pemabangunan kawasan wisata JTP

2 terhadap kondisi sosial ekonomi antara lain munculnya keramaian yang bisa memberikan tambahan pendapatan bagi pihak pengelola dan bagi warga sekitar yang membuka usaha bidang pariwisata, membuka kesempatan kerja baru bagi masyarakat sekitar terutama yang berhubungan langsung dari pariwisata sehingga bisa dijadikan sebagai sumber penghasilan masyarakatnya.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Gatot Erwan (2013), yang berjudul Kajian Kondisi Sosial Ekonomi Pedagang Kaki Lima di Jalan Perintis Kemerdekaan Kecamatan Purwokerto Selatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Kondisi Sosial Ekonomi Pedagang Kaki Lima di Jalan Perintis Kemerdekaan Kecamatan Purwokerto Selatan. Sample yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan *quota sample*. Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini adalah Kondisi Sosial Ekonomi di Jalan Perintis Kemerdekaan Kecamatan Purwokerto Selatan termasuk dalam kategori sedang.

H. Kerangka Pikir





Gambar : 2.1 Diagram Alur Kerangka Pikir

I. Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah : Lokasi berjualan berimplikasi terhadap kondisi sosial ekonomi pedagang kaki lima yang berlokasi dekat dengan Obyek Wisata Guci (kurang dari 50 Meter) dan jarak jauh (lebih dari 50 Meter) Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal lebih dari 50% termasuk dalam kriteria sedang.